

INTEGRASI AWAL TERBENTUKNYA KERAJAAN-KERAJAAN LOKAL DI SULAWESI SELATAN

FIRST INTEGRATION OF LOCAL KINGDOMS IN SOUTH SULAWESI

Sahajuddin

Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan
Jalan Sultan Alauddin / Tala Salapang Km. 7 Makassar, 90221
Telepon (0411) 885119, 883748, Faksimile (0411) 865166
Pos-el: saj.sahajuddin@yahoo.com
Handphone: 081342630331

Diterima: 28 Februari; Direvisi: 2 April; Disetujui: 31 Mei 2018

ABSTRACT

This study aims to reveal the first integration of local kingdoms formation in South Sulawesi. The method used is the historical method which explains problems based on historical perspectives. The study results showed that the formation of local kingdom in South Sulawesi occurred in the XIII century. These kingdoms had existed before the tribal alliances, called akkarungeng or karaengang. The kingdoms that were formed in the XIII century were kingdom that had been organized their government system. The first process of forming these kingdoms began with the internal conflicts of the kingdom which were successfully united by To Manurung. The existence of To Manurung in each kingdom is different, some consider it as a myth or a fairy tale, and some others consider it as a historical event. Apart from that, it must be recognized that the myth of To Manurung in South Sulawesi is one of the factors that contributes in strengthening the Bugis-Makassar cultural values or the people of South Sulawesi in general.

Keywords: *integration, local kingdom, To Manurung, internal conflict.*

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan mengungkapkan integrasi awal terbentuknya kerajaan-kerajaan lokal di Sulawesi Selatan. Metode yang digunakan adalah metode sejarah, yang menjelaskan persoalan berdasarkan perspektif sejarah. Hasil kajian menunjukkan bahwa terbentuknya kerajaan-kerajaan lokal yang ada di Sulawesi Selatan terjadi pada abad XIII. Kerajaan-kerajaan tersebut telah ada sebelum kelompok persekutuan kesukuan yang disebut *akkarungeng* atau *karaengang*. Kerajaan yang terbentuk pada abad XIII adalah kerajaan yang sudah terorganisir dari segi sistem pemerintahannya. Proses awal terbentuknya kerajaan-kerajaan tersebut berawal dari adanya konflik-konflik internal kerajaan yang berhasil dipersatukan oleh *To Manurung*. Keberadaan *To Manurung* di setiap kerajaan berbeda-beda, ada yang menganggapnya sebagai mitos atau dongeng, ada pula yang menganggapnya sebagai peristiwa sejarah. Terlepas dari itu, harus diakui bahwa mitos tentang *To Manurung* di Sulawesi Selatan merupakan salah satu faktor yang ikut menguatkan nilai kebudayaan Bugis-Makassar atau masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya.

Kata kunci: *integrasi, kerajaan lokal, To Manurung, konflik internal.*

PENDAHULUAN

Integrasi awal terbentuknya kerajaan-kerajaan lokal di Sulawesi Selatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan situasi sosial politik yang terjadi pada zamannya, khususnya abad XIII. Artinya, bahwa setiap zaman mengalami proses dan permasalahan integrasi yang berbeda. Demikian juga persoalan integrasi pada masa awal terbentuknya kerajaan

dengan masa kerajaan atau melompat pada masa kekinian, tentu memiliki tingkat dan derajat persoalan yang berbeda-beda pula. Jika kita memperhatikan integrasi Indonesia pada akhir-akhir ini ada kecenderungan mengalami kemajuan, namun tidak dapat dipungkiri masih adanya konflik-konflik di berbagai daerah. Walaupun harus diakui bahwa persoalan integrasi merupakan persoalan yang dialami

semua negara, terutama negara-negara yang masih berkembang, termasuk Indonesia. Hal ini disebabkan karena mendirikan suatu kerajaan atau negara berarti harus memiliki visi dan misi untuk menyatukan orang-orang dengan segala perbedaan yang ada, yaitu berusaha menjadi satu entitas kebangsaan baru yang menyertai berdirinya wilayah tersebut.

Sulawesi Selatan termasuk salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki kerajaan lokal yang sangat banyak, menandakan juga banyaknya perbedaan. Perbedaan-perbedaan itulah yang mau diintegrasikan tanpa harus mengorbankan adanya perbedaan dalam berbagai hal. Dengan banyaknya perbedaan tersebut, sampai sekarang negara Indonesia masih menghadapi persoalan tentang bagaimana menyatukan penduduk Indonesia yang di dalamnya terdiri dari berbagai macam suku, penganut agama yang berbeda-beda, berbahasa dengan bahasa daerah yang beranekaragam, serta memiliki kebudayaan daerah yang berbeda satu sama lain. Kemudian berusaha untuk menjadi satu entitas baru yang dinamakan bangsa Indonesia. Mestinya persoalan integrasi yang berbeda-beda pada setiap zaman memerlukan solusi penyatuan yang berbeda-beda pula. Namun pada tulisan ini, khusus mengkaji persoalan integrasi pada awal terbentuknya kerajaan-kerajaan lokal di Sulawesi Selatan.

Pada masa kerajaan, persoalan integrasi juga merupakan persoalan yang sangat riskan dan sangat membahayakan. Karena persoalan integrasi pada masa kerajaan selalu mengedepankan kekuatan dan kekuasaan. Pengalaman menunjukkan bahwa dalam perjalanan membangun kehidupan bernegara ini, kita masih sering dihadapkan pada kenyataan adanya konflik antarkelompok dalam masyarakat, baik konflik yang berlatarbelakang kesukuan, konflik antarpenganut agama, konflik karena kesalahpahaman budaya, dan semacamnya. Hal itu menunjukkan bahwa persoalan integrasi Indonesia sejauh ini masih belum tuntas. Lalu bagaimana dengan persoalan integrasi awal terbentuknya kerajaan, apakah pada masa itu,

persoalannya sama dengan persoalan integrasi pada masa sekarang, kalau berbeda bagaimana perbedaannya.

Ada kecenderungan bahwa persoalan integrasi pada awal terbentuknya kerajaan memang sangat berbeda dengan persoalan integrasi pada masa kekinian. Persoalan integrasi pada awal terbentuknya kerajaan lebih kepada persoalan penyatuan wilayah dari satu kesukuan atau *kearungan* menjadi satu kerajaan besar yang independen. Keadaan itu dianggap wajar karena kerajaan pada fase itu baru mau dibentuk dan dibesarkan. Sementara persoalan integrasi Indonesia sekarang, bukan lagi menyatukan wilayah tetapi mempertahankan wilayah dengan berbagai macam persoalan dan konflik di dalamnya. Sehingga antara zaman kerajaan dengan zaman kemerdekaan Indonesia, menghadapi persoalan integrasi yang juga berbeda. Zaman kerajaan di Sulawesi Selatan saja, juga harus melihat periodisasinya, kapan kerajaan itu terbentuk dan bagaimana prosesnya.

Setiap provinsi di Indonesia berdasarkan data yang ada, selalu mengklaim bahwa di provinsinya pernah berdiri sebuah atau banyak kerajaan pada masa lampau, termasuk di Sulawesi Selatan. Kemudian setiap kerajaan itu, memiliki proses sejarah terbentuknya, dan itu berbeda-beda pada setiap kerajaan. Proses pembentukan itulah yang kami anggap sebagai integrasi awal terbentuknya kerajaan. Namun di Sulawesi Selatan memiliki kecenderungan yang hampir sama pada setiap kerajaan yang ada di daerah ini, yaitu dimulai dengan adanya konflik-konflik internal kerajaan tersebut. Apakah konflik karena persoalan ekspansi dari salah satu komunitas kesukuan atau *kearungan/kekaraengan* untuk memperluas wilayahnya, kemudian setelah berhasil menaklukkan beberapa wilayah, lalu membentuk dan mengikrarkan diri sebagai kerajaan. Selain itu, ada kerajaan yang terbentuk akibat ada beberapa *kearungan/kekaraengan* yang secara sukarela menggabungkan diri menjadi satu dan membentuk kerajaan. Tetapi itu pun tidak terlepas dari adanya konflik internal karena di dalam perkembangannya, semua unit

kearungan/kekaraengan berusaha menjadi raja kepala dari beberapa unit *kearungan/kekaraengan* itu. Sementara unit *kearungan* lain tidak mau diperintah di bawah supremasi salah satu unit yang lain, sehingga terjadi konflik-konflik internal sebagaimana yang terjadi di Kerajaan Gowa dan Bone.

Kasus Kerajaan Gowa dan Bone merupakan kasus kerajaan federasi karena terdiri dari beberapa unit kerajaan kecil di dalamnya. Di Kerajaan Gowa ada sembilan unit kerajaan kecil dan di Kerajaan Bone ada tujuh unit kerajaan kecil. Tujuh unit kerajaan kecil yang ada di Kerajaan Bone selalu berusaha menjadi pemegang supremasi dari enam unit kerajaan kecil lainnya, tetapi enam unit diantaranya tidak mau dibawah. Demikian juga kasus yang terjadi di Kerajaan Gowa, sembilan unit kerajaan kecil yang ada di dalamnya sama-sama tidak mau mengalah. Sehingga suasana konflik dingin itu berkepanjangan sampai akhirnya muncul tokoh juru selamat yang dikenal dengan sebutan *To Manurung*.

Persoalan lain dalam proses integrasi kerajaan adalah persoalan setelah *To Manurung* raib atau menghilang, di situ terjadi lagi konflik internal untuk mencari raja penggantinya. Kasus raibnya *To Manurung* pada setiap kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan, juga sering kita temui dalam beberapa sumber. Sehingga integrasi dan konflik pada setiap kerajaan di masa awal-awal terbentuknya kerajaan merupakan pemandangan yang biasa terjadi. Namun dari sekian banyak kerajaan yang mengalami kasus seperti itu, juga memiliki kecenderungan yang sama, yaitu munculnya benda-benda secara ajaib. Di mana benda-benda atau ornamen-ornamen itu dianggap memiliki kelebihan dan kemampuan ajaib pula dibandingkan dengan benda yang sejenisnya. Benda-benda itu, kemudian dipercaya dan diyakini sebagai benda peninggalan *To Manurung*, itulah sebabnya benda itu dikultuskan sebagai benda yang disebut dengan *arajang* (Bugis) atau *kalompoang* (Makassar). Lalu *arajang/kalompoang* itu dipercaya sebagai warisan atau perwakilan dari

To Manurung. Namun yang menarik di sini karena penemu benda (*arajang/kalompoang*) itu, apa lagi jika berhasil dimiliki, memelihara dan mempertahankannya maka sekaligus padanyalah dianggap sebagai raja perwakilan dari *To Manurung*.

Kasus seperti di atas yang akan melahirkan sistem pemerintahan aristokrasi yang berada di tangan para bangsawan dan elit-elit lainnya. Walaupun dalam kenyataannya sistem aristokrasi itu tidak bersifat absolut anarkis, tetapi terbuka melalui dewan adat yang terbentuk dalam kerajaan tersebut. Sehingga raja tetap dapat terkontrol dengan adanya dewan adat yang memiliki tugas dan fungsi yang hampir sama dengan DPR saat ini. Semua bagian dari proses itu dalam satu kerajaan tertentu merupakan bagian dari proses integrasi awal terbentuknya sebuah kerajaan. Walaupun dalam realitas di Sulawesi Selatan, memiliki varian lain dalam proses pembentukan sebuah kerajaan, sebut saja Kerajaan Tanete Barru. Varian yang dimaksud adalah tokoh juru selamatnya. Kalau di kerajaan lain yang ada di Sulawesi Selatan juru selamat dari adanya konflik internal yang berkepanjangan adalah *To Manurung*, sementara di Kerajaan Tanete Barru adalah *To Sangiang*. Dua tokoh ini memiliki perbedaan dan persamaan di dalam mengintegrasikan wilayahnya menjadi sebuah kerajaan yang besar.

Perbedaannya bahwa *To Manurung* sekaligus menjadi raja, sementara *To Sangiang* hanya bertindak sebagai penyatu atau tokoh yang berusaha mempersatukan dari beberapa wilayah menjadi sebuah kerajaan. Kemudian setelah *To Sangiang* berhasil membentuk kerajaan, ia berusaha mencari pihak ketiga untuk diangkat dan dilantik menjadi raja pada kerajaan yang baru terbentuk. Inilah dua kasus tokoh pengintegrasi awal terbentuknya kerajaan-kerajaan lokal di Sulawesi Selatan. Dari kasus itu pula, kajian ini dianggap penting untuk dilakukan dalam memberi gambaran dan penjelasan tentang proses terbentuknya sebuah kerajaan di Sulawesi Selatan.

METODE

Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah yang mengalami proses sejarah panjang di Nusantara. Sejarah panjang itu, ditandai dengan munculnya beberapa kerajaan lokal di daerah ini. Terbentuk sebelum abad XIII sampai memasuki dekade awal abad XX. Terbentuknya pun berbeda-beda tetapi memiliki kecenderungan yang sama, yaitu dimulai dengan munculnya tokoh mitologis yang dikenal dengan *To Manurung*. Kecenderungan tersebut dapat mencerminkan sebagai isyarat adanya komunitas kesukuan atau adanya kerajaan yang sudah terorganisir tetapi dalam keadaan konflik, lalu muncul juru selamat dari konflik yang berkepanjangan tersebut. Walaupun keberadaannya masih sering dipertanyakan, namun peran dan nilainya sangat besar dalam kehidupan sosial budaya dan politik di Sulawesi Selatan. Sehingga kajian itu memerlukan metode yang sesuai dengan kejadian peristiwanya, yaitu metode sejarah.

Kajian ini mengacu pada penelitian studi pustaka dengan metode sejarah kritis sesuai dengan langkah-langkah penelitian sejarah pada umumnya. Langkah pertama adalah penentuan topik penelitian sebagaimana di atas. Adapun langkah-langkah penelitian sejarah (Cottschalk, 1985:27) tersebut adalah (1) heuristik, yaitu mencari dan mengumpulkan data-data atau sumber-sumber yang berkaitan dengan terbentuknya kerajaan-kerajaan lokal di Sulawesi Selatan; (2) kritik sumber, artinya bahwa tidak semua sumber yang berkaitan dengan objek penelitian yang diperoleh itu akan dipergunakan sebagai kebenaran analisis tetapi diseleksi melalui kritik; (3) interpretasi, sering disebut penafsiran sejarawan terhadap sumber-sumber yang diperoleh; (4) Historiografi, sering diartikan sejarah penulisan sejarah secara luas. Maksudnya sebagai suatu kesatuan dari proses rekonstruksi yang kita sebut historiografi (Kartodirdjo, 1985: 9). Melalui metode tersebut, diharapkan dapat memberikan penjelasan seperti apa dan bagaimana proses integrasi awal terbentuknya kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan.

PEMBAHASAN**Terbentuknya Kerajaan**

Kerajaan-kerajaan dan asal usul raja-raja di Sulawesi Selatan selalu mengacu pada *To Manurung* (Bugis) atau *Tu Manurung* (Makassar). Namun harus juga diakui bahwa sebelum kedatangan *To Manurung* di Sulawesi Selatan dalam banyak sumber menyebutkan juga bahwa banyak kerajaan-kerajaan yang berdiri dan eksis. Walaupun juga harus dikuasai bahwa kerajaan yang dimaksud belum menjadi kerajaan mapan yang kita kenal pada abad XVII. Sebab kerajaan yang dimaksud masih dalam bentuk kesatuan komunitas yang dikenal dengan *kekaraengan* atau *kearungan* (Sahajuddin, 2011:35-37). Komunitas ini disatukan dengan konsepsi yang dikenal dengan *kegallarangan* atau *gaukang* (Makassar) atau *gaukeng* (Bugis). Dalam perjalanan sejarah, tampaknya kesatuan komunitas ini tidak dapat mempertahankan kemandiriannya. Pada satu sisi, ada yang berhasil membesarkan komunitasnya, namun pada sisi lain, ada yang tidak berhasil tetapi melebur pada komunitas lainnya (Amir dan Sahajuddin, 2011:1-11).

Kecenderungan yang ada pada kerajaan yang berkembang pada masa itu memiliki keinginan untuk memperluas wilayahnya, bahkan menaklukkan dan menguasai komunitas yang lain, sebut saja *kegallarangan* yang satu dengan *kegallarangan* yang lain, sehingga timbul perselisihan dan peperangan. Proses awal integrasi kerajaan pada masa lampau seperti itu merupakan gambaran dan kenyataan kehidupan masyarakat ketika itu. Keadaan itu digambarkan dengan istilah "saling memangsa seperti ikan" (*sianre balei taue*) (Hamid. 1991: 32-61; Ahimsa Putra, 1988). Lalu timbul keinginan dari sejumlah pimpinan komunitas *gaukang* untuk menjalin hubungan kerja sama dan saling membantu. Tujuannya adalah untuk meredakan dan menyelesaikan pertentangan di antara mereka; dapat menyatukan kekuatan dalam menghadapi ancaman dari luar. Dalam hubungan inilah sering dicatat dalam penulisan sejarah sebagai bentuk persekutuan komunitas *gaukang*

dari kerajaan-kerajaan kecil dan menjadi sebuah kerajaan besar.

Jalanan hubungan kerjasama dan saling membantu itu akhirnya menghantar komunitas itu membentuk dewan persekutuan yang dipimpin masing-masing oleh *arung* atau *karaeng* dari *kearungan* atau *kekaraengan* itu, dan memilih salah seorang di antara anggota-anggota dewan menjadi ketua dewan. Menyangkut kehidupan persekutuan, dewan ini berfungsi sebagai lembaga pengadilan dalam menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang terjadi antara *kekaraengan* yang menjadi anggota persekutuan itu. Ketua dewan merupakan anggota terpenting dalam penyelesaian sengketa antar *kekaraengan*. Oleh sebab itulah, kedudukan ketua dewan adat itu umumnya dengan sebutan adat masing-masing kerajaan, sebut saja Kerajaan Gowa dikenal dengan istilah *pacallaya*. Di pihak lain, dalam menghadapi ancaman dari luar, ketua dewan itu tampil sebagai figur utama dalam menyatukan kekuatan dari anggota persekutuan. Hal ini yang oleh sebagian penulis cenderung menyatakan ketua dewan itu dengan istilah "raja kepala" (*hoffdvorst*) (Poelinggomang, 2004: 6-15; Sahajuddin, 2011: 53-57).

Raja kepala terkait dengan proses pengintegrasian kerajaan tersebut dari beberapa bagian yang sering disebut *kegallarangan*. Dalam perkembangan demikian ketika bentuk-bentuk *kegallarangan* berusaha menyatukan beberapa *kegallarangan* menjadi satu federasi kemudian menjadi satu kesatuan pemerintahan dalam bentuk kerajaan. Maka tercipta lagi pola kepemimpinan tidak langsung, atau sistem kepemimpinan bertingkat. *To Manurung* dan raja kepala (*hoolf vorst*) yang tampil sebagai pucuk pimpinan kerajaan merupakan kesatuan dari beberapa *kegallarangan* beserta keturunannya yang mendapat status kebangsawanan dan kemampuan untuk memerintah pada tingkat pusat pemerintahan (Sahajuddin, 2011: 53-36).

Lembaga persekutuan atau dewan adat ini sesungguhnya bukan merupakan suatu lembaga tetap atau permanen. Pertemuan anggota dewan ini baru terselenggara bila ada permasalahan yang

dipandang harus dipikirkan dan diselesaikan bersama. Kehadiran mereka juga tergantung dari undangan ketua dewan dan umumnya pertemuan dilakukan di kediaman ketua dewan. Pada umumnya, kedudukan atau jabatan ketua lembaga persekutuan selalu dipertahankan oleh *arung* atau *karaeng* yang pertama dipilih untuk tetap diwarisi bagi keturunannya. Walaupun demikian, ketua lembaga persekutuan tidak memiliki wewenang untuk mencampuri urusan pemerintahan dari *kearungan* atau *kekaraengan* yang menjadi anggota persekutuan itu. Masing-masing *arung/karaeng* dari setiap *kearungan/kekaraengan* melaksanakan kekuasaan dan pemerintahan di wilayah *kearungan/kekaraengan* mereka masing-masing sesuai dengan kebiasaan dan tradisi setempat tanpa campur tangan ketua lembaga persekutuan.

Kedudukan ketua lembaga persekutuan sebagai figur utama dalam mempersatukan kekuatan anggota persekutuan dalam menghadapi ancaman dari luar lambat laun berkembang menjadi pemimpin dari persekutuan yang berperan mengurus kegiatan di luar kerajaan seperti menjalin kerjasama dengan kerajaan-kerajaan lain. Dalam hal ini sering wilayah persekutuan itu dipandang sebagai bentuk pemerintahan serikat (*konfederasi*), dan menampilkan ketua lembaga persekutuan sebagai raja kepala dan *arung/karaeng* dari *kearungan/kekaraengan* sebagai pengikut (*minawang*) raja kepala. Setiap *arung/karaeng* memiliki kekuasaan otonom penuh di wilayah *kearungan/kekaraengan* masing-masing.

Di antara bentuk "pemerintahan serikat" yang berkembang di Sulawesi Selatan ini, beberapa di antaranya berkembang menjadi bentuk "kerajaan besar" dengan menampilkan konsep *To* (Bugis) *Tu* (Makassar) *Manurung*. Konfederasi Gowa, misalnya, mulanya merupakan persekutuan dari sembilan *kekaraengan*, kemudian berubah menjadi Kerajaan Gowa, setelah ditemukannya seorang putri yang tidak diketahui namanya dan dari mana asalnya, dinobatkan sebagai ratu Kerajaan Gowa yang pertama dengan nama *Tu Manurung* yang

kemudian menurunkan keturunan raja-raja yang memerintah Kerajaan Gowa berikutnya. Sembilan *karaeng* yang pada awalnya merupakan anggota dari lembaga persekutuan itu, kemudian menjadi satu dewan kerajaan yang dikenal dengan nama *Kasuwiyang Salapang* (Sembilan Pengabdi). Dewan *Kasuwiyang Salapang* ini, kemudian dirubah namanya *Bate Salapang* atau “Sembilan Panji” (Patunru. 1993; Pangerang, 2009: 41-79).

Hal yang sama pula terjadi pada bentuk kerajaan di tanah Bugis, misalnya kerajaan Bone. Sebelum berdirinya kerajaan ini, terdapat tujuh kelompok *kearungan* (wilayah kekuasaan) yang membentuk satu persekutuan yang dikenal dengan nama *Kawerrang Tana Bone* (Ikatan Tanah Bone). Setelah pengangkatan raja, lembaga persekutuan itu berubah menjadi dewan adat yang dikenal dengan *Matoa Pitue*. Dewan *Matoa Pitue* ini kemudian berubah nama menjadi *Ade' Pitue*.

Pelantikan *Tu' Manurung* (Makassar) atau *To Manurung* (Bugis) diikat oleh sebuah ikrar bersama antara *To Manurung* dan anggota dewan persekutuan. Namun setelah *To Manurung* raib, ikrar raja dan rakyat tetap ada. Ikrar itu kemudian secara turun temurun digunakan dan diucapkan pada waktu pelantikan “raja baru” yang dinobatkan sebagai raja. Pada dasarnya ikrar itu memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak dalam kehidupan kenegaraan, yaitu hak dan kewajiban raja, serta hak dan kewajiban rakyat. Hal ini dapat dilihat dalam ikrar pelantikan yang merupakan “perjanjian kenegaraan” (*governmental contract*). Pelantikan raja baru setelah *To Manurung* raib, secara turun temurun tetap *To Manurung* dianggap dan dipercaya hadir melalui *arajang* atau *kalompoang* yang beliau tinggalkan.

Ikrar pelantikan itu menunjukkan bahwa kehadiran tokoh yang digelar *To Manurung* sebagai peletak dasar terbentuknya kerajaan. Sehingga raja yang baru diangkat dipercaya memiliki predikat manusia dewa untuk memerintah manusia di bumi ini karena

dipercaya mewakili *To Manurung*, jadi raja yang baru diangkat itu bukanlah pemilik kekuasaan mutlak. Itulah sebabnya dalam ikrar itu terdapat butir-butir yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban penguasa dan rakyat. Kenyataan itu menunjukkan bahwa mitos *To Manurung* hanyalah merupakan konsep pengabsahan kedudukan pemegang kendali kekuasaan (raja) bagi terbentuknya kerajaan, sekaligus memberikan supremasi (status kebangsawanan khusus) bagi pemegang kendali kekuasaan dan keturunannya menjadi lapisan teratas dalam kehidupan politik dan sosial.

Ornamen Kerajaan dan Polemik Kehadiran *To Manurung*

Harus diakui bahwa kehadiran *To Manurung* dalam proses integrasi setiap kerajaan secara internal di Sulawesi sulit terbantahkan. Walaupun dalam kajian disiplin ilmu sejarah sering diperdebatkan atas kebenaran keberadaan *To Manurung*. Namun persoalan benar tidaknya, maupun persoalan mitos atau sejarah di Sulawesi Selatan, *To Manurung* ini mampu menciptakan suasana berbeda pada kerajaan itu. Suasana yang berbeda yang dimaksud adalah suasana sebelum dan sesudah peristiwa awal munculnya *To Manurung* dalam kerajaannya. Boleh dikata bahwa hampir semua kerajaan yang memiliki proses mitologis keberadaan *To Manurung* di kerajaannya menceritakan tentang keberhasilan *To Manurung* untuk membangun kerajaan itu. Tetapi yang menjadi konflik baru atau persoalan baru, terjadi lagi disaat *To Manurung* raib atau menghilang di kerajaan itu. Terjadi lagi konflik internal dalam kerajaan tersebut, terkait dengan penggantinya sebagai raja dari kerajaan itu, kalau keturunannya, apakah bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat dan keturunannya juga terkadang lebih dari satu orang. Lalu bagaimana dengan *To Manurung* yang belum memiliki keturunan lalu raib, siapa yang menjadi penerusnya. Hal itulah yang dianggap sebagai konflik baru.

Berdasarkan sistem politik pemerintahan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, tampak

bahwa konsep *To Manurung* sebagai simbol pemersatu. Namun belum cukup menjawab semua persoalan yang timbul dalam kerajaan pasca kepergiannya di kerajaan itu. Makanya *To Manurung* selalu dilengkapi dengan simbol lainnya yang dilekatkan padanya sebagai bagian dari *prestise* atau keisimewaannya, sekaligus menjadi keunggulan *To Manurung*. Simbol yang dimaksud adalah ornamen kerajaan. Ornamen kerajaan, sering disebut *kalompoang* (Makassar) atau *arajang* (Bugis) merupakan sesuatu yang menentukan supremasi kekuasaan yang dimiliki oleh *To Manurung* (Hamid, 1991:35; Kadir, 1984).

Pada unit politik komunitas atau kerajaan yang disebut *kekaraengan* selalu dipautkan pada benda yang ditemukan secara ajaib dengan bentuknya unik yang disebut *gaukang* (Makassar) atau *gaukeng* (Bugis), yang kemudian disebut *kalompoang*, maka pada kerajaan-kerajaan yang menggunakan konsep *Tu Manurung*, ornamen kerajaan itu disebut *kalompoang* atau *arajang*. Ornamen kerajaan adalah benda peninggalan tokoh yang disebut *Tu (To) Manurung*, yang menjadi peletak dasar kerajaan. Benda itu merupakan jaminan pengabsahan yang memberikan kesaksian bahwa pemegangnya telah memiliki kekuasaan sebagai perwalian pemilik utama kekuasaan yang berasal dari ornamen kerajaan. Dengan demikian, pemegang kekuasaan itu akan bekerja sesuai petunjuk pemilik utama kekuasaan itu bagi kesejahteraan dan ketertiban masyarakat. Itulah sebabnya ketaatan rakyat kepada seorang raja bergantung pada *gaukang/gaukeng* atau *kalompoang* yang dipegangnya.¹

Gaukang atau *kalompoang* kemudian menjadi persyaratan untuk semua kekuasaan dan

kewenangan, atau dengan kata lain pemilikan benda itu berhubungan dengan penguasaan yang sah dan lambang kedudukan bagi yang melaksanakan kekuasaan. Ia merupakan jaminan legitimasi karena memberikan kesaksian bahwa pemegang telah memiliki kekuasaan yang berasal dari kekuatan yang menguasai alam semesta ini. Pemimpin sebagai pemegang *ornament (gaukang)* itu dipandang memiliki wewenang sebagai pusat pengendali kekuatan masyarakat, sekaligus menjadi imam yang mengkultuskan kekuatan itu. Untuk mengabsahkan kedudukan itu maka setiap dilakukan pelantikan pejabat pengganti penguasa atau pengganti raja senantiasa dibacakan ikrar kepatuhan, ketaatan melalui tata tertib. Aturan dan tata tertib ini adalah warisan dari pendiri kerajaan, sesuai dengan tradisi yang berlaku di kerajaannya masing-masing (Poelinggomang, 2004).

Kalompoang atau *Arajang* sebagai jaminan pengabsahan kedudukan kekuasaan dalam kehidupan pemerintahan di Sulawesi Selatan, berlangsung terus hingga akhir masa pemerintahan kerajaan. Sebagai contoh, pada 1931, ketika Pemerintah Hindia Belanda ingin memulihkan kedudukan kekuasaan bekas Kerajaan Bone dengan maksud agar dapat terjalin hubungan kerjasama, yaitu kerja sama dengan para bangsawan Kerajaan Bone dengan Pemerintah Hindia Belanda. Untuk itu Belanda terpaksa harus mengembalikan *arajang* kerajaan Bone yang telah disita dan dirampas oleh Belanda ketika Bone diduduki pada 1905. Demikian pula halnya dengan Kerajaan Gowa, yang dipulihkan kedudukannya dengan memberi status *swapraja (zelfbestuur landschap)* pada 1938, juga dengan penyerahan benda pusaka atau *kalompoang* kerajaannya. Hal itu tentu berkaitan dengan anggapan bahwa *kalompoang* atau *arajang* adalah benda pusaka yang dapat menjadi jaminan kesucian dan ketaatan rakyat. Melalui ornamen itu, pemegang penerima kekuasaan akan terikat pada ikrar kepatuhan serta menjadi ikatan pengakuan dan ketaatan rakyat.

Gambaran ini menunjukkan bahwa proses eksternalisasi yang menciptakan gagasan

¹*Gaukang* adalah suatu benda yang dipandang merupakan benda titisan dewa sehingga benda itu dianggap suci dan memiliki kekuatan supranatural. Benda itu yang memberikan kewenangan kepada penemunya dan kemudian keturunannya untuk tampil sebagai pemimpin komunitas. Makanya *gaukang* itu dianggap sebagai wakil dan simbol akan kehadiran dewa pada *gaukang* atau *gaukeng* tersebut. Penemu *gaukang*, maupun keturunannya juga mendapat superioritas (suatu status kebangsawanan) dan kemampuan untuk memerintah.

gaukang atau *kalompoang* merupakan nilai yang tetap dilestarikan dalam kehidupan politik dan sosial kerajaan. Gagasan tersebut menjadi jaminan kesucian dan ketaatan yang menuntut setiap anggota kesatuan politik untuk bersikap dan bertindak jujur terhadap diri sendiri. Tujuannya, agar kekuatan yang menguasai alam semesta dapat menjamin terwujudnya tujuan kerajaan yaitu kesejahteraan dan ketertiban. Sehubungan dengan itu, seakan-akan *gaukang* atau *kalompoang* memberikan wewenang kepada penguasa dalam menjalankan kendali politik dan struktur hubungan-hubungan sosial.

Hampir seluru kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan, memiliki kisah berdirinya atau awal terbentuknya kerajaan tersebut, dimulai dari kisah *Tu (To) Manurung*. Demikian pula halnya tentang terbentuknya kerajaan-kerajaan di berbagai wilayah di Sulawesi Selatan, yaitu berawal dari kisah ditemukannya sesosok manusia yang memiliki kelebihan dan keterampilan melebihi manusia pada umumnya dalam masyarakat lokalitas. Perlu dipahami bahwa *To Manurung* dalam konsep bahasa lokal di Sulawesi Selatan (Bugis-Makassar) memiliki arti tersendiri. Dalam bahasa setempat (lokal), *To Manurung* artinya orang yang turun (dari langit). Istilah ini sebenarnya hanyalah istilah yang digunakan oleh para *passura*’ atau *pallontara*’ sehingga nampaknya juga meragukan bahwa benar-benar ada orang yang turun dari langit. Padahal tidak ada kisah yang menyatakan bahwa ada orang yang menyaksikan secara langsung turunnya sesosok manusia dari langit. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan para *passura*’e atau *pallontara*’ bahwa: Konon disebut *To Manurung* (orang yang turun) karena tidak diketahui siapa ibu dan ayahnya (Hamid, 1991: 32).

Kedatangan *To Manurung* ini adalah bertujuan untuk memerintah di bumi agar situasi kacau balau yang sering digambarkan sebagai *sianre’ balei tau’e*, artinya orang saling memangsa bagaikan ikan, dapat teratasi dengan kehadiran *To Manurung*. Dari kehadiran *To Manurung* di beberapa tempat ataupun wilayah, maka kelompok-kelompok *anang* yang ada di

sekitar tempat itu dihimpun menjadi satu dalam suatu persekutuan yang lebih besar, kemudian berkembang semakin besar yang dikenal sebagai kerajaan, seperti misalnya kerajaan Luwu, Gowa, Bone, dan Soppeng. Semua kerajaan tersebut, masing-masing dipimpin dan dipersatukan oleh *To Manurung* sebagai raja atau ratu di awal integrasi internal kerajaannya. Untuk menjamin kelangsungan hidup dan keutuhan persekutuan yang dipimpin oleh raja atau ratu tersebut, maka dibuatlah aturan-aturan atau hukum yang menjelaskan batas-batas hak dan kewajiban antara raja dengan rakyatnya.

Selain pengistilahan yang berbeda-beda, ada pula pendapat tentang keberadaan *To Manurung* yang berbeda-beda, ada yang menganggapnya sebagai mitos atau dongeng, namun ada pula yang menganggapnya sebagai sejarah dan lain sebagainya. Ada suatu pendapat yang mengatakan, bahwa mitos tentang *To Manurung* di Sulawesi Selatan merupakan salah satu anasir yang ikut menguatkan nilai kebudayaan Bugis-Makassar atau masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya. Ia dipercaya sebagai cerita-cerita yang mengandung peristiwa-peristiwa dan makna-makna yang aktual. Seorang ahli antropologi bernama Levi-Strauss, mengatakan bahwa mitos tidak perlu dipertentangkan antara mitos dengan sejarah atau kenyataan karena perbedaan makna dari dua konsep ini terasa makin sulit. Setiap kejadian dalam sejarah dan setiap mitos yang terbangun masing-masing memiliki makna yang berbeda sehingga keduanya merupakan satu unsur terpenting dari peradaban umat manusia, ia bukan cerita omong kosong, tetapi suatu kekuatan aktif yang tangguh; bukan suatu penjelasan intelektual atau suatu khayalan semata, tetapi ia suatu perjanjian tentang kepercayaan dan kebijaksanaan moral yang mempunyai makna dan manfaat” (Ahimsa Putra, 2006: 77).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka tidak ada salahnya jika *To Manurung* kita tempatkan sebagai konsep yang bernilai sangat tinggi di Sulawesi Selatan dalam proses sejarahnya. Sebab *To Manurung* tidak

dapat dilepaskan dari proses integrasi internal kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah ini. Ikatan itu tetap melekat walaupun terlepas dari persoalan mitos, sejarah atau bahkan konspirasi politik kelampauan Sulawesi Selatan. Untuk itu, pemahaman *To Manurung* tidak dapat diabaikan dalam konstelasi politik pemerintahan awal di Sulawesi Selatan, sehingga pengertian dan makna *To Manurung* patut diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya (Ahimsa Putra, 1988: 90-99; Sahajuddin, 2011:29-32; Hamid, 1991: 36).

Kehadiran atau kedatangan tokoh *To Manurung* yang sama sekali asing bagi semua orang atau kelompok, sering digambarkan sebagai "manusia ajaib" yang berasal dari dunia lain. Anggapan-anggapan itu dipercaya dan diyakini sebagai nilai dan anugerah dari yang Maha Kuasa. Sehingga anggapan itu dipercaya bahwa *To Manurung* berasal dari dunia atas (*boting langit*) atau dari dunia bawah (*buri'liung*) yang disebut sebagai *To Manurung* yang arti harfiahnya merupakan orang yang turun (dari langit), tetapi secara pemaknaan sering, disebut *To Manurung* karena tidak diketahui asal muasalnya (Poelinggomang, 2005: 12-19). Di samping itu, pula karena telah menjadi kebiasaan dari masyarakat Sulawesi Selatan, dalam hal mengungkapkan rasa hormat atau terima kasih kepada orang-orang yang dianggap sebagai orang berjasa, kadang memberikan gelar atau sebutan serta sanjungan berupa cerita-cerita yang terkadang dilebih-lebihkan dan bahkan kurang rasional. Hal seperti ini dapat dilihat dari kisah-kisah tentang kelahiran ataupun kehidupan tokoh.

Membandingkan dengan *To Sangiang*

Proses awal keberadaan kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan pada umumnya selalu diawali dengan mitos-mitos sebagai bentuk pengesahan dan legalitas kerajaan sebagaimana telah disinggung di atas. Patut diakui, bahwa sebelum mitos-mitos itu muncul dan menjadi suatu konsep legalitas kerajaan, sebenarnya kerajaan-kerajaan itu telah lama ada dan eksis menurut pemikiran kolektif kelampauan mereka

seperti di kerajaan Luwu, Bone, Gowa, Soppeng, Wajo, Tanete Bantaeng, Turatea dan kerajaan lain yang ada di Sulawesi Selatan. Mitos itulah yang memunculkan tokoh *To Manurung* dan diwarisi oleh raja-raja berikutnya. Namun kenyataan historis yang ada menunjukkan dan kemunculannya selalu bertepatan dengan adanya konflik-konflik internal kerajaan yang bersangkutan. Keberadaan tokoh inilah yang dianggap sebagai juru selamat yang membawa keamanan, ketentraman dan kemakmuran kerajaan.

Sejak munculnya kerajaan-kerajaan lokal di Sulawesi Selatan sampai menjadi kerajaan yang utuh dan independen. Walaupun tidak semua kerajaan mengalami proses yang sama tetapi kebanyakan kerajaan-kerajaan lokal di Sulawesi Selatan menunjukkan kecenderungan itu. Kemudian kerajaan-kerajaan itu mengalami perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat. Namun kemajuan itu tidak dapat ditempatkan secara terpisah dari sejarah perdagangan kerajaan besar lainnya seperti Kerajaan Gowa dan kerajaan-kerajaan lain yang menguasai produksi komoditi di pedalaman. Hal itu bukan hanya didasarkan atas kenyataan bahwa kegiatan perdagangan berkaitan erat dengan interaksi antara seseorang dengan orang yang lainnya, atau antara kelompok dengan kelompok lainnya di setiap kerajaan. Tetapi juga karena terjadinya percaturan ekonomi yang kuat antarakerajaan dalam menguasai sumber-sumber ekonomi dalam membangun kerajaan atau bangsa-bangsa berdasarkan kekuatan ekonomi.

Konstelasi politik kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan pada masa lampau selalu punya kecenderungan untuk menyelesaikan masalah lewat pihak ketiga dengan apa yang disebut *To Manurung* seperti yang terjadi di Gowa, Bone, Luwu, Soppeng dan lain-lain. Namun ada juga variasi tertentu walaupun kemunculannya juga diawali adanya konflik internal dalam kerajaan bersangkutan seperti yang terjadi di Tanete. Sehingga penjelasan tentang *To Manurung* yang selalu muncul pada saat kerajaan itu dalam keadaan konflik, maka seperti itu pula yang

terjadi di kerajaan Tanete Barru, walaupun bukan dengan istilah *To Manurung* tetapi dengan sebutan *To Sangiang*.

Jika membandingkan antara *To Manurung* dengan *To Sangiang*, barangkali dapat dicontohkan dengan *To Manurung* di Bone yang diawali dengan mitologi yang tidak berangka tahun. Walaupun diperkirakan bahwa *To Manurung* proses awal munculnya terjadi sekitar abad XIII. Dikisahkan bahwa *To Manurung* muncul pada saat kerajaan kosong dalam jabatan raja kepala karena tujuh unit kerajaan yang ada di Bone selalu sulit menentukan pilihan siapa yang paling layak memegang kekuasaan tertinggi atau sebagai raja kepala (Kartodirdjo, 1988:58).² Kondisi itu berlarut-larut sampai datangnya *To Manurung*. Di mana dikisahkan bahwa kedatangan *To Manurung* diawali dengan hujan ribut, guntur menggelegar yang tiada henti-hentinya selama sepekan, disertai angin kencang sehingga terjadi gempa. Setelah gempa berhenti, nampaklah salah seorang yang berpakaian putih-putih di suatu tanah lapang, namun tidak ada seorang pun yang mengetahui identitas orang yang berpakaian putih-putih itu, sehingga di beri nama *To Manurung*. Pada saat orang-orang Bone memintanya *To Manurung* (orang yang berpakaian putih-putih itu) untuk menjadi raja di Bone, tiba-tiba orang itu berkata bahwa permintaanmu itu baik sekali dan mulia tetapi kalian salah karena saya juga hanyalah hamba. Namun jika rajaku yang kalian maksud dan minta menjadi raja, maka baiklah kiranya saya antarkan ke sana (Ahimsa Putra, 1988: 91; Mappangara, 2004:1-2) .

Perjalanan menuju tempat yang dimaksud pada waktu itu, juga disertai angin kencang, kilat, petir dan guntur bersambut-sambutan. Setelah sampai di Matajang sebagai tempat yang dimaksud, maka terlihatlah oleh orang banyak (rombongan) pembesar dari Bone, yaitu seorang laki-laki duduk berpakaian kuning di sebuah batu “Napara” beserta tiga orang pengikutnya yang duduk di dekatnya. Ketiga orang itu masing-

masing punya pegangan, satu memegang payung memayungi orang yang berpakaian kuning itu, satu memegang kipas, dan yang satu lagi memegang “*salenrang*” (puan atau tempat sirih) (Mappangara,2004:2). Pada saat itulah terjadi tawar menawar kepentingan demi kerajaan Bone, dan dari situlah terwujud suatu kontrak perjanjian antara *To Manurung* sebagai raja dengan orang Bone sebagai rakyatnya. Inilah awal integrasi Kerajaan Bone dari tujuh unik kerajaan yang ada, dan selanjutnya keturunan dari *To Manurung* tersebut mewarisi tahta kerajaan berikutnya.

Hal yang menarik pula untuk dibandingkan dengan *To Manurung* adalah *To Sangiang* pada masa awal Kerajaan Tanete. Perbandingan yang dimaksud di sini adalah masalah konflik internal kerajaan Tanete dengan munculnya *To Sangiang*, sebab kalau yang diperbandingkan mengenai periodisasi proses awal keberadaan *To Manurung* di kebanyakan kerajaan di Sulawesi Selatan dengan periodisasi proses awal kemunculan *To Sangiang* di Kerajaan Tanete merupakan periode yang berbeda. *To Manurung* banyak diberitakan muncul sekitar abad XIII dan atau abad XIV, sementara *To Sangiang* di Tanete muncul sekitar abad XV atau abad XVI. Namun masa awal Kerajaan Tanete juga mengisyaratkan cerita mitologis tetapi sangat berbeda dengan kerajaan-kerajaan lain yang ada di Sulawesi Selatan. Kalau kerajaan lain pada umumnya melahirkan tokoh *To Manurung*.

Kerajaan Tanete yang pada awal kemunculannya bernama kerajaan Agangnionjo dan sekarang adalah Kabupaten Barru. Kemudian dalam perkembangannya mencapai puncak kejayaan ketika Tanete terlibat langsung dalam aktivitas perdagangan baik lokal, nusantara maupun dunia, sehingga pernah menjadi sebuah kota niaga yang besar yang didatangi berbagai pedagang-pedagang dari Soppeng, Wajo, Rappang dan Melayu. Sejak “*rumpa’na Pancana*” pada 1824, meriam-meriam Belanda dan pasukan Raja Tanete Lapatau telah menghancurkan Pancana sebagai kota dan pusat Kerajaan Tanete. Sejak itu, Pancana tidak lagi menunjukkan kedudukannya sebagai kota niaga.

²Kerajaan Bone berkembang dari gabungan tujuh unit politik (kerajaan) inti, ialah Ujung, Tibojong, Ta, Tante Riattang, Tanete riawang, Ponceng dan Macege

Sebagaimana kerajaan-kerajaan lain di Sulawesi Selatan, Kerajaan Tanete melahirkan tokoh pemersatu yang mampu mengintegrasikan kerajaan secara internal kerajaan tersebut. Kalau kerajaan lain di Sulawesi Selatan melahirkan tokoh yang disebut *To Manurung*, sedangkan di Kerajaan Ternate disebut *To Sangiang*. *To Sangiang* ini diduga dari dunia bawah yang ditandai dengan adanya ciri-ciri berupa air dalam *balubu* yang selalu penuh dengan air dan ikan yang banyak dalam *balubu* tersebut. Keberadaan ikan itu, karena sewaktu-waktu dibawa oleh burung-burung yang mengabdikan padanya di atas Gunung Pangli. Keluarga *To Sangiang* inilah yang nantinya membuka lahan pertanian yang cukup subur dan mendatangkan kemakmuran. Tempat itu tidak begitu jauh dari laut dengan sebutan Arung Nionjo, kemudian menjadi Agang Nionjo dan selanjutnya diabadikan menjadi kerajaan Agangnionjo sebagai cikal bakal kerajaan Tanete nantinya pada masa pemerintahan Raja VII Tu Maburu Limanna. Pada masa terbentuknya kerajaan Agangnionjo sampai pada masa pemerintahan Tu Maburu Limanna yang kami anggap sebagai masa awal kerajaan Tanete karena pada masa itu nama kerajaan Agangnionjo berubah menjadi kerajaan Tanete.

Tradisi lisan masyarakat Tanete yang kita kenal sekarang di mana pada masa lampau di daerah tersebut diceritakan adanya beberapa kerajaan yang sudah eksis dengan sebutan *kearungan* atau wilayah kekuasaan seseorang penguasa yang disebut *arung*. Adapun *arung* yang sangat terkenal pada masa itu ialah Arung Pangli dan Arung Alekale (Longi, 2001:2). Di mana dikisahkan Arung Pangli adalah *arung* yang mempunyai hobi berburu. Pada suatu waktu Arung Pangli bersama pengiringnya melakukan perburuan di kawasan Pegunungan Pangli. Pada saat mereka mencapai puncak Gunung Pangli di daerah Jangang-jangangnge (Longi, 2001:2) dijumpai sebuah tempayan (*balubu*) yang berisi air, sebagai suatu pertanda bahwa di tempat itu ada penghuninya. Dugaan itu ternyata benar karena rombongan mereka (Arung Pangli) menemukan

sepasang suami-istri sedang duduk santai dan di sekitarnya berterbangan burung-burung bangau yang sering datang menghampiri mereka (keluarga *To Sangiang*) dengan membawa ikan. Ikan-ikan mentah yang dibawa burung-burung itu diberikan kepada pasangan suami-istri (*To Sangiang*) itu sebagai makanan mereka.

Kenyataan itu merangsang rasa ingin tahu Arung Pangli dan pengiringnya, sehingga Arung Pangli dan pengiringnya datang menghampiri pasangan suami-istri itu dan bertanya tentang asal-usulnya. Jawaban yang diperoleh Arung Pangli bukannya memberikan keterangan yang jelas dan pasti, tetapi bahkan menimbulkan pemikiran mistis. Mereka (pasangan suami-istri) hanya menyatakan bahwa mereka tinggal di puncak gunung itu atas kehendak sang Dewata, dan asal mula datangnya, dia mengatakan bahwa sama seperti orang yang lain, yaitu dari arah penjuru mata angin; barat, timur, selatan, atau utara (Poelinggomang, 2005:16). Setelah Arung Pangli selesai bercerita dengan pasangan suami istri itu, Arung Pangli selanjutnya menyuruh pengiringnya menyiapkan perbekalan yang dibawa untuk makan bersama, termasuk mengajak pasangan suami-istri tersebut.

Ajakan itu dijawab pasangan suami istri itu dengan ramah-tamah “silahkan makan dan silahkan gunakan air dalam tempayan itu. Kami tidak makan nasi tetapi hanya memakan ikan mentah yang dibawa oleh burung-burung itu”. Jawaban itu menimbulkan pertanyaan Arung Pangli, siapa gerangan sesungguhnya pasangan suami-istri ini. Apakah mereka orang yang diturunkan dari dunia atas (*boting langi*) yang sering disebut *To Manurung* karena berada di puncak gunung ataukah orang yang dimunculkan dari dunia bawah (*paratiwi*) melalui laut yang biasa disebut *To Tompo* karena hanya memakan ikan mentah. Persoalan itu yang mendorong Arung Pangli dan pengiringnya menyebut pasangan suami istri itu dengan sebutan *To Sangiang*. Setelah bersantap, Arung Pangli memohon pada *To Sangiang* itu untuk turun ke gunung dan menetap di Pangli, tetapi ajakan Arung Pangli itu dijawab oleh *To Sangiang*

dengan mengatakan bahwa kami akan turun kelak jika Dewata mengizinkan. Lalu Arung Pangi pun minta pamit seraya berharap dan berkata bahwa mudah-mudahan suatu saat nanti kita dipertemukan kembali.

Setelah Arung Pangi sampai di kerajaannya, mereka pun mendatangi Arung Alekale untuk memberitahukan kepada Arung Alekale tentang kisah perburuannya di puncak Jangang-jangangnge Gunung Pangi. Sehingga bersepakatliah Arung Pangi dan Arung Alekale untuk menemui *To Sangiang* di puncak itu. Segala sesuatu dipersiapkan untuk menemui *To Sangiang* dan setelah sampai di puncak akhirnya mereka pun bertemu. Kemudian Arung Pangi menyampaikan kepada *To Sangiang* bahwa ia datang bersama kerabatnya Arung Alekale, yang juga berkeinginan untuk menjalin persahabatan.

Setelah Arung Pangi selesai berbicara, Arung Alekale menyambung pembicaraan itu dengan menawarkan kepada *To Sangiang* kiranya berkenan dapat tinggal di negerinya, dan menjalin hubungan kekeluargaan. Dengan demikian kita mendapatkan berkat dan rahmat Dewata. Namun *To Sangiang* merespon tawaran itu dengan jawaban seperti yang pernah diutarakan kepada Arung Pangi sebelumnya. Dalam pembicaraan itu yang berlangsung santai dan bersahaja, akhirnya mereka pun (rombongan Arung Pangi dan Arung Alekale) minta pamit pulang kembali ke negerinya tanpa disertai *To Sangiang* (Poelinggomang, 2005:16).

Hasrat Arung Pangi untuk mengajak turun gunung *To Sangiang* tidak pernah luntur dan ternyata akan segera terkabul sebab *To Sangiang* juga memiliki hasrat yang sama agar supaya anak perempuannya dapat dipersunting oleh putra Arung Pangi. Hasrat *To Sangiang* disampaikan kepada Arung Pangi ketika pertemuan kunjungan ketiganya, ditanggapi dan disambut dengan senang hati oleh Arung Pangi walaupun Arung Pangi sendiri tidak mempunyai putra dengan menyatakan bahwa kami sangat gembira menerimanya. Kemudian Arung Pangi pun bermohon perkenaan untuk kembali setelah melakukan pembicaraan itu dan berjanji kelak akan segera kembali untuk menikahkan anak

Arung Pangi atau anak keluarganya dengan putri *To sangiang*.

Arung Pangi dan pengiringnya kembali ke Pangi dan langsung mengirim utusan untuk menyampaikan kepada Arung Alekale menyampaikan hasil pembicaraan mereka dengan *To Sangiang*. Kemudian seluruh kerabat disuruh berkumpul dan membicarakan tawaran *To Sangiang*. Hasil pertemuan keluarga itu adalah melamar dan menikahkan putri *To Sangiang* itu dengan putra Arung Alekale. Berdasarkan kesepakatan itu berangkatlah rombongan ke tempat kediaman *To Sangiang* untuk melamar dan menikahkan putra Arung Alekale dengan putri *To Sangiang*. Kehadiran rombongan Arung Alekale dan Arung Pangi itu disambut gembira oleh *To Sangiang* sehingga rencana peminangan dan pernikahan juga langsung diselenggarakan. Arung Alekale memberi gelar Arung Riale-alena (Longi, 2001: 16) setelah menantunya tiba ke negerinya.

Keluarga *To Sangiang* setelah beberapa waktu pasca pernikahan anak putrinya dengan anak putra Arung Alekale, mereka pun berhijrah untuk turun gunung dengan membawa istrinya dan anak putranya sebanyak tiga orang. Mereka pun berkelana dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari daerah pemukiman yang baru dan dapat mendatangkan kemakmuran. Setelah lama mencari dan memilih daerah yang cocok akhirnya mereka memilih dan menetap pada suatu daerah yang disebutnya Rittampawali (Patunru, 2004:60; Gising, 2002:6; Poelinggomang, 2005:18), kemudian di tempat itu mereka membuka lahan pertanian sawah dengan sebutan La Ponrang (Longi, 2001: 6; Gising, 2002: 6; Patunru, 2004:60). Keluarga ini semakin lama semakin senang dan makmur membuka lahan pertanian. Tetapi keharmonisan itu mulai terusik ketika anaknya yang sulung berselisih paham dan bertengkar dengan adiknya. Mereka bertengkar berkaitan dengan lahan yang mereka kerjakan dan alat yang mereka gunakan seperti bajak (*rakkala*) dan garu (*salaga*). Untuk mencegah pertikaian itu berlarut dan menimbulkan dampak negatif yang lebih keras, *To Sangiang*. Kemudian keseluruhan lahan itu diberinya nama Arung Nionjo, yang

kemudian berubah dan diabadikan menjadi Kerajaan Agangnionjo (Patunru, 2004: 8).

Kehidupan mereka tentram dan memperoleh hasil usaha yang berlimpah karena seluruh lahan kosong berhasil dikelola menjadi lahan pertanian. Namun kehidupan yang penuh kebahagiaan dan kehormonisan itu ternyata tidak dapat dipertahankan terus. Berselang beberapa tahun kemudian terjadi lagi pertengkaran dan perselisihan antara putranya yang sulung dengan adiknya. Pertengkaran dan perselisihan itu semakin hari semakin meningkat intensitasnya dan mengarah pada tindakan kekerasan untuk saling membunuh. Solusi yang dilakukan oleh *To Sangiang* seperti tempo yang lalu agaknya masih kurang memuaskan sehingga *To Sangiang* mencari solusi yang lain. Namun uniknya solusi yang dilakukan ini juga sangat berbeda pada proses penyelesaian konflik internal kerajaan lain. Tujuannya adalah untuk mencapai kedamaian, ketentraman dan kemakmuran bersama seperti munculnya *To Manurung* (Ahimsa Putra, 1988: 43-49). Ia muncul sebagai juru selamat, demikian juga *To Sangiang*, walaupun ia bukan sebagai aktor tetapi ia sebagai mediator pemersatu dengan cara mencari bantuan kepada raja Segeri (*Karaeng Segeri*). Yang ketika itu menjabat sebagai Karaeng Segeri adalah seorang keponakan dari Raja Gowa X, I Manriwa Daeng Bonto Karaeng Lakiung Tunipalangga Ulaweng (1546-1565). Ketika *To Sangiang* meminta bantuan tersebut Karaeng Segeri menerima baik tawaran itu dan menyatakan bersedia membantu menyelesaikan perselisihan yang terjadi di Angangnionjo. Tetapi Karaeng Segeri tidak seketika itu juga memenuhi permintaan *To Sangiang* karena saat itu rakyatnya telah memulai mengolah lahan pertanian.

Karaeng Segeri dalam menangani perselisihan itu, mengambil langkah-langkah yang bersifat persuasif. Langkah yang dimaksud adalah langkah pendekatan kepada kedua belah pihak yang bertikai, yaitu antara anak sulung dengan anak bungsu *To Sangiang*. Karaeng Segeri dalam solusi tersebut tidak menyalahkan satu pihak lalu membenarkan lainnya, tetapi memberikan penjelasan berkaitan dengan nilai kerugian dan manfaat orang yang bertengkar

dari dua bersaudara. Akhirnya dari penjelasan tersebut dianggap menyelesaikan masalah yang adil dan sangat bijaksana, hanya dengan penjelasan tentang kerugian yang dialami oleh kedua belah pihak yang bertikai.

Atas keberhasilan Karaeng Segeri menyelesaikan perselisihan di Agangnionjo itu, tidak hanya memberikan kepuasan dan kegembiraan *To Sangiang* dan kerabatnya tetapi juga kagum atas kepemimpinannya. Oleh karena itu, *To Sangiang* bersama warga Agangnionjo pada umumnya bersepakat untuk memohon kepada Karaeng Segeri agar bersedia menetap di Agangnionjo dan sekaligus menjadi raja Agangnionjo. Apa yang menjadi keinginan *To Sangiang* itu ternyata Karaeng Segeri bersedia menerima amanah itu. *To Sangiang* melantik Arung Segeri menjadi raja Agangnionjo yang pertama dengan diberi gelar Datu GollaE: 1552-1564 (Gising, 2002:12; Poelinggomang, 2005: 22).

PENUTUP

Kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan dalam proses awal dan perkembangannya pada umumnya diawali dengan konsep mitologis. Konsep ini dibangun berdasarkan pemikiran kolektif kelampauan mereka. Demikian juga kehadiran *To Manurung* dapat dimaknai sebagai realitas historis. Keberadaannya menjadi sangat berarti sebagai juru selamat yang mampu mempesatukan kerajaan. Sebelum munculnya *To Manurung*, landasan awal kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan dimulai dari sistem *kearungan* atau *kekaraengan*, kemudian sistem tersebut berkembang menjadi suatu kekuatan-kekuatan politik, baik secara demografi wilayah, ekonomi, sosial, budaya maupun hubungannya dengan dunia luar. Sistem itu lama kelamaan semakin besar dan berkembang, sehingga akhirnya menjadi sebuah kerajaan. Sementara sistem komunitas *kearungan/kekaraengan* yang tidak mampu berkembang akan melebur ke kerajaan lain.

Lahirnya kerajaan baru tidak berarti semuanya telah selesai, tetapi di situlah persoalan

kerajaan sesungguhnya baru dimulai. Persoalan internal kerajaan yang berkepanjangan itulah yang memunculkan *To Manurung* sekitar abad XIII. Di sinilah sebagai integrasi awal terbentuknya sistem pemerintahan kerajaan baru, yaitu dari pemerintahan atau kekuasaan kelompok *anang* (kaum). Kemudian menjadi sistem pemerintahan kelompok-kelompok persekutuan *anang* yang lebih luas, dan akhirnya menjadi kerajaan-kerajaan yang sesungguhnya. Jadi munculnya *To Manurung*, sebenarnya tidak terikat dan sebatas, apakah mitos atau bukan mitos, karena cerita-cerita tentang keberadaannya super menakjubkan karena mampu mempengaruhi dan merubah tatanan nilai yang ada sebelumnya.

Kerajaan Tanete yang sebelumnya disebut kerajaan Agangnionjo, juga tidak luput dari konsep mitologis, yaitu hadirnya *To Sangiang* sebagai pendiri cikal bakal kerajaan Agangnionjo yang diawali konflik-konflik internal di antara mereka. Kerajaan ini adalah hasil gabungan atau integrasi dari kelompok-kelompok kesatuan masyarakat Tanete yang ada pada waktu itu. Namun kelompok yang sangat terkenal adalah *Kearungan Pang*i dan *Kearungan Alekale*. Arung Pang*i* dan Arung Alekale dianggap sebagai wakil dunia tengah. Sementara *To Sangiang* dianggap sebagai wakil dunia atas karena berada di atas puncak JangangjangangE Gunung Pang*i*. Dapat juga dikatakan berasal dari dunia bawah karena *To Sangiang* hanya makan ikan mentah dari laut yang dibawa oleh burung-burung yang mengabdikan padanya. Tetapi penyatuan antara Arung Pang*i* dan Arung Alekale dengan *To Sangiang* sebagai cikal bakal terbentuknya kerajaan Agangnionjo atau Kerajaan Tanete.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahimsa Putra, Heddy Shri. 1988. *Minawang: hubungan Patron-Klien di Sulawesi Selatan*, Gadjah mada University Press, Yogyakarta.
- , 2006. *Strukturalisme Levi-Strauss: Mitos dan Karya Sastra*, Kepel Press, Yogyakarta.
- Amir dan Sahajuddin. 2011. *Konfederasi Mandar: Kajian Sejarah Persekutuan Antar Kerajaan di Sulawesi Barat*, Dian Istana, Makassar.
- Gising, Basrah. 2002. *Sejarah Kerajaan Tanete*, Sama Jaya Makassar, Makassar.
- Gottschalk, Louis. 1985. *Mengerti Sejarah*, yang diterjemahkan oleh Nugroho Notosusanto, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Hamid, Pananrangi. 1991. "Sejarah Kabupaten Tingkat II Soppeng", Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Ujung Pandang, Makassar.
- Longi, Syarif. (editor). 2001. *Kerajaan Agangnionjo* (Tanete), Proyek Pengadaan Sarana Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Barru tahun Anggaran 2001, Barru.
- Kadir, Harun dkk. 1984. *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia Di Sulawesi Selatan (1945-1950)*, diterbitkan atas kerjasama Bappeda Tingkat I Provinsi Sulawesi Selatan dengan Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Kartodirdjo, Sartono. 1985. *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia: Suatu Alternatif*. Jakarta: Gramedia Jakarta.
- , 1988. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 Dari Emporium Sampai Imperium Jilid I*, Gramedia, Jakarta.
- Mappangara, Suriadi, 2004. *Kerajaan Bone Dalam Sejarah Politik Sulawesi Selatan Abad XIX*, Makassar, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Sulawesi Selatan
- Pangerang, Rimba Alam A. 2009. *Sejarah Singkat Kerajaan di Sulawesi Selatan*, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar
- Patunru, Abd. Razak Daeng. 1993. *Sejarah Gowa*, Makassar (Ujung Pandang), Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, Ujung Pandang.
- , 2004. *Bingkisan Patunru, Sejarah Lokal Sulawesi Selatan*, Makassar, Pusat Kajian Indonesia Timur bekerja sama

- dengan lembaga penerbitan Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Poelinggomang, Edward L. 2004. *Perubahan Politik dan Hubungan Kekuasaan Makassar 1906-1942*, Ombak, Yogyakarta.
- _____. dkk. 2004. *Sejarah Sulawesi Selatan Jilid I*, Makassar, Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Propinsi Sulawesi Selatan.
- _____, 2005. "Sejarah Tanete Dari Agangnionjo Hingga Kabupaten Barru" Pemerintah Kabupaten Barru, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Barru.
- Sahajuddin, 2011. *Butta Toa Bantaeng Menjawab Zamannya 1666-1905*, Pustaka Sawerigading, Makassar

